

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahan nya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Creative media, Jakarta, 2009.
- Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, , Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Insan Budi Maulana. *Catatan Singkat Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Jakarta, 1998.
- Munir Fuady. *Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: bagaimana cara memenangkan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2007.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Nico Ngani. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Ningrum Natasya Sirait, dkk, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha, Partnership For Business Competition*, Jakarta, 2003.
- OECD. *Pedoman Untuk Mengatasi Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rocky Marbun, *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2010
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Y. Sogar Simamora. *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017.

Jurnal

Anna Maria Tri Anggraini. Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 1 No. 2, 2009.

Ari Purwadi. Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, No. 2, Agustus 2019.

Dewi Nawang Wulan, dkk. Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Mimbar Yustitia* Vol. 3 No. 3 Desember 2019.

Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol.1, no. 01 (2008).

Muskibah. Larangan Persekongkolan dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Inovatif: Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, 2013.

Paripurna dan M. Hawin. Per se Rule dan Rule of Reason. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 1998.

Sukarmi, "Peran UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Di Era AFTA," *Jurnal Persaingan Usaha* Vol.10, no. 1, 2010.

Yakub Adi Kristanto. Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No. 2, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Mengenai Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Internet

Abu Samman Lubis. *Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2014, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/>.

----- Urgensi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-malang-urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-3b899a90/>.

Antara News. 2018. “LKPP: pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik masih rendah.” (<https://www.antaranews.com/berita/932384/lkpp-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik-masih-rendah>).

[Http://www.kppu.go.id/id/putusan/](http://www.kppu.go.id/id/putusan/)

<https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat>.

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
<http://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/13521/0/AUDIT-ATAS-PELAKSANAAN-LELANG-SECARA-ELEKTRONIK-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-PEMERINTAH.bpkp>.

Hukumonline.com. LKPP Gandeng KPPU”.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c6424cee54ac/kppu-akangandeng-lkpp-atasi-kasus-persekongkolan-tender>.

I Ketut Karmi Nurjaya, *Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No.1, Januari 2009, hlm. 84.

Diakses dari web
[http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT %20KARMI%20NURJAYA.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9J2009%20I%20KETUT%20KARMI%20NURJAYA.pdf),

Justitia Law Firm, 2016, “Persekongkolan Tender Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, diakses dari <https://www.justitialawfirm.or.id/>, pada tanggal 20 Januari 2021.

KBBI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

LKPP. “Sejarah dan Latar Belakang”. <Http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>.